

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

TESIS

Oleh :

**A Z M I
NPM. 171801004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di
Kabupaten Aceh Singkil**

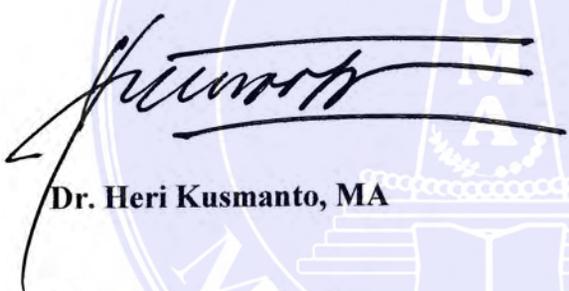
N a m a : Azmi

N P M : 171801004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



Medan, 09 April 2019

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
CCEEAFF561282389

6000
ENAM RIBURUPIAH

A Z M I
NPM 171801004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul **“Efektifitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil”** ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada program pasca sarjana universitas Medan Area.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini, mudah mudahan Allah SWT kelak yang akan membalasnya di Yaumul akhir nanti, dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun kepada khalayak umum baik akademisi dan pemerintahan untuk sebagai bahan dalam pengambil kebijakan.

Singkil, April 2019

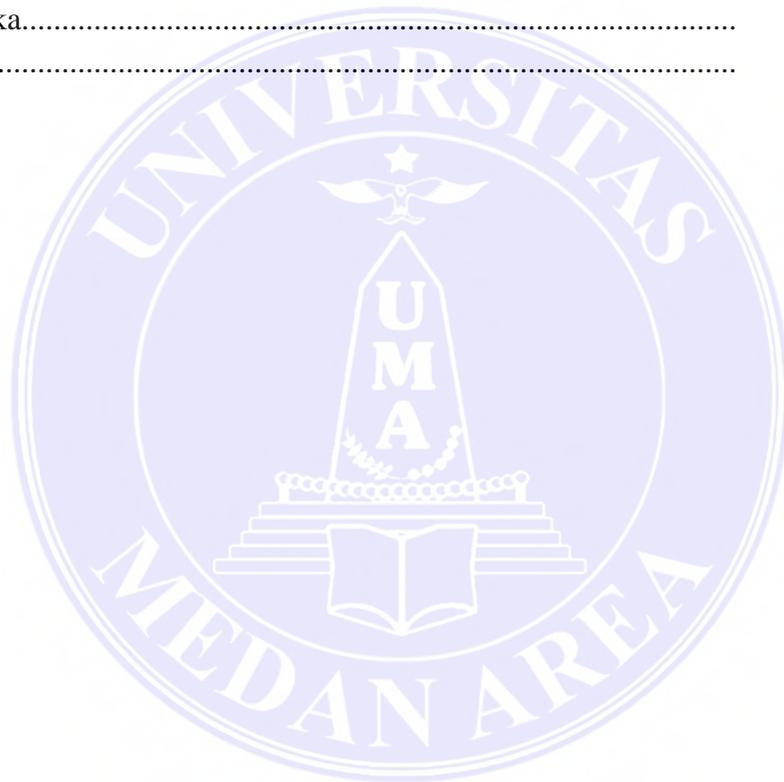
Hormat Saya

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Efektifitas	6
2.2 Pengertian Peranan.....	7
2.3 Mukim	8
2.4 Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi	13
2.5 Peranan Kepala Mukim dalam Pengambilan Keputusan	14
2.6 Konsep Manajemen Strategi	15
2.7 Analisis SWOT	17
2.8 Penelitian Terdahulu	22
2.9 Kerangka Pemikiran.....	28
III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	34
3.4 Metode Analisis	36
3.5 Definisi Konsep.....	40
IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran umum Penelitian.....	42
4.2 Karakteristik Responden.....	50
4.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Imeum Mukim Dalam Struktur Pemerintahan Aceh.....	52

4.4 Distribusi Frekuensi Masing- Masing Variabel.....	53
4.5 Efektifitas Peranan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di kabupaten Aceh Singkil	60
4.6 Strategi Penguatan Keberadaan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten aceh Singkil	63
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	75
Lampiran.....	76

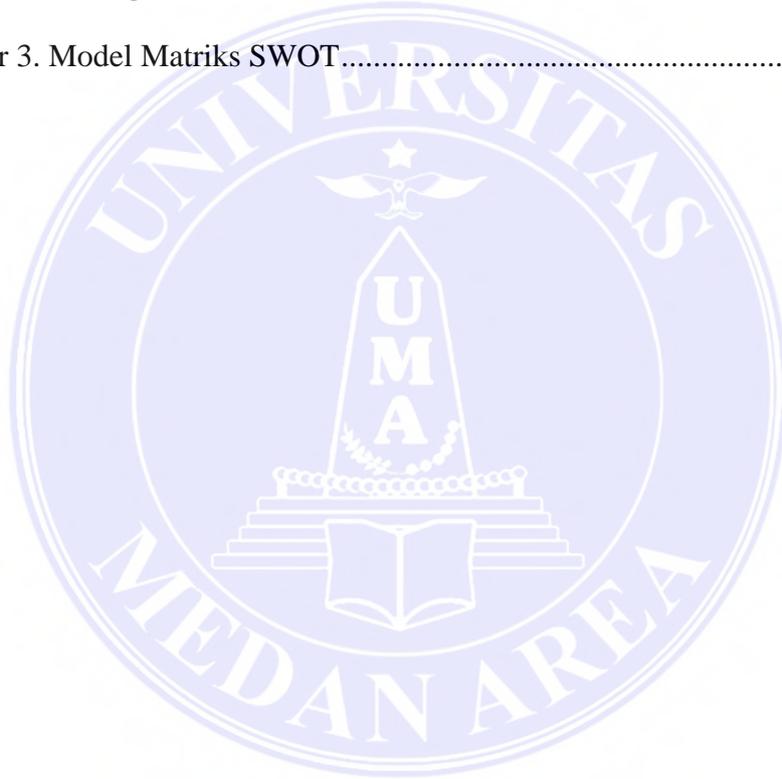


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks SWOT	18
Tabel 3.1 Data Primer	33
Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data Skunder.....	34
Tabel 3.3 Daftar Responden Untuk Menganalisis Peranan Mukim.....	35
Tabel 3.4 Daftar Responden untuk Inventarisir Faktor Internal dan Eksternal	35
Tabel 3.5 Kategori Penilaian.....	38
Tabel 3.6 Format penentuan Bobot factor Internal dan Eksternal	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk perkecamatan.....	45
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.3 Jumlah Kecamatan, Mukim dan Desa.....	47
Tabel 4.2.1 Umur Responden.....	50
Tabel 4.2.2 Jenis kelamin responden	51
Tabel 4.2.3 tingkat Pendidikan Responden.....	51
Tabel 4.4.1 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	53
Tabel 4.4.2 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Kesempatan Kerja.....	55
Tabel 4.4.3 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Pembangunan.....	56
Tabel 4.4.4 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Budaya Daerah.....	56
Tabel 4.4.5 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah	57
Tabel 4.4.6 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Eksistensi Lembaga Mukim	58
Tabel 4.4.7 Keberadaan Mukim Dapat Meningkatkan Eksistensi Aparatur Pemerintahan.....	59
Tabel 4.5.1 Distribusi Variabel Responden dan total Skor Responden..	61
Tabel 4.6.1 Faktor Strategis Internal dan eksternal.....	64
Tabel 4.6.2 Matriks IFE	67
Tabel 4.6.3 Matriks EFE	68
Tabel 4.6.7 Hasil Analisis Matriks IFE dan EFE.....	71

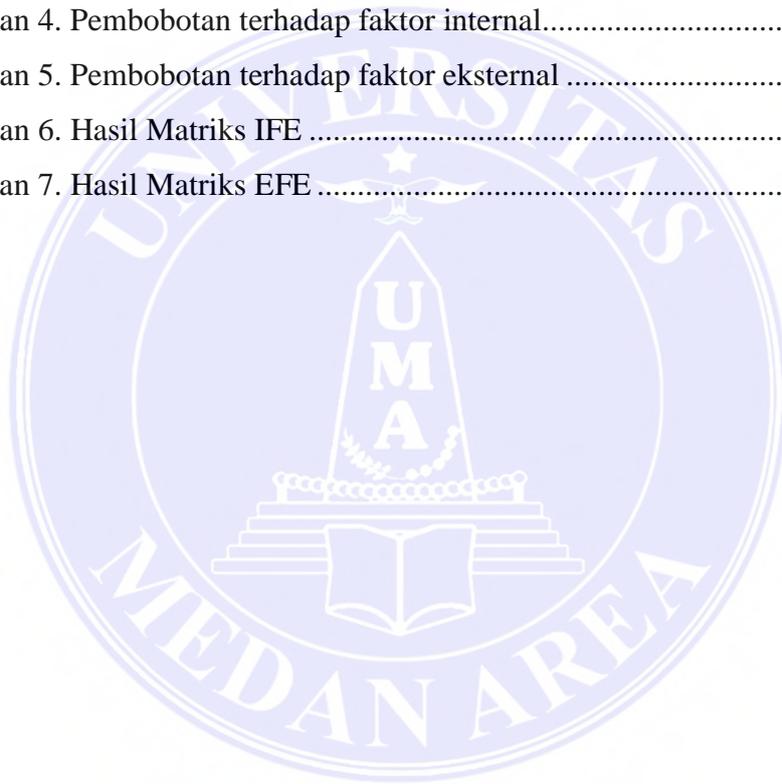
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram SWOT.....	21
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 3. Model Matriks SWOT.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Quisioner Penelitian	77
Lampiran 2. Distribusi Variabel Responden dan Total Skor	82
Lampiran 3. Peratingan terhadap Faktor Internal dan eksternal	83
Lampiran 4. Pembobotan terhadap faktor internal.....	84
Lampiran 5. Pembobotan terhadap faktor eksternal	90
Lampiran 6. Hasil Matriks IFE	95
Lampiran 7. Hasil Matriks EFE	96



**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH
A Z M I
NPM. 171801004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Nama : A Z M I

N P M : 171801004



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Isnaini, SH.M.Hum

Drs. Heri Kusmanto, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Nama : A Z M I

N P M : 171801004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Drs. Heri Kusmanto, MA,

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Dr. Warjio, MA

Telah diuji pada tanggal 9 April 2019

Nama : Azmi
NPM : 171801004

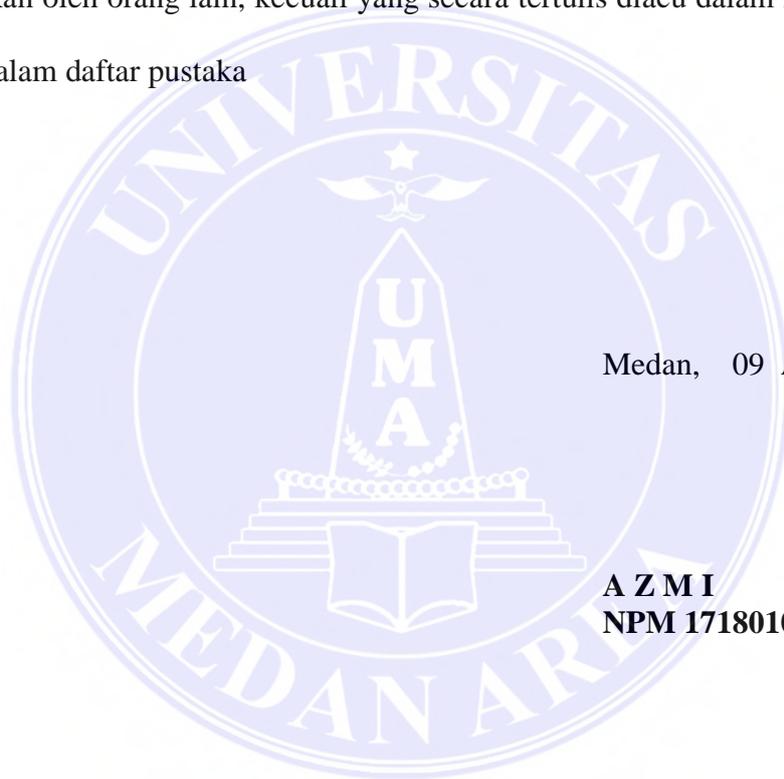


Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Drs. Kariono, MA
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M. Hum
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

P E R N Y A T A A N

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



Medan, 09 April 2019

A Z M I
NPM 171801004

ABSTRAK

Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Nama : A z m i
N P M : 171801004
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH. M.Hum
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara *de jure*, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara *de facto*. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim.

Kata Kunci : Efektivitas, Mukim, Sistem Pemerintahan, Strategi

ABSTRAK

The effectiveness of the role of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency

Name : A z m i
N P M : 171801004
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Isnaini, SH. M.Hum
Supervisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Normative-Juridical basis of existence of mukim with political symbols of sovereignty inherent in Mukim recognized de jure, in other words the existence of the Mukim acclaim and inaugural address in positive law, but this recognition turns out to inconsistent and aligned the de facto. Basically, the involvement of Residents in the planning and conducting of gampong Government strategy the Government of Aceh gampong role greater than only in admit as a functioning governmental units lebh likely only be recognized as functioning governmental units became regent of mere customs. Problems in the study is how the effectiveness of the role of mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency of Aceh province, how the strategy of strengthening against the existence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. The purpose of this research is to know the effectiveness of the role of the system of Government in Mukim against Aceh Singkil Regency of Aceh province, to review the strategy of strengthening the presence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency.

This research is descriptive research, namely to describe about the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency. There are two problems in this research is to look at the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency and the strategy of Strengthening the presence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. Respondents to see the effectiveness of the role of the Government of Aceh Residents in Aceh Singkil Regency of as many as 33 people, consisting of 11 people, 20 head of Mukim, 1 custom figures and 1 person Scholars.

Of research results can be explained that for the effectiveness of the role of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is less effective. Strategies that can be made in strengthening the presence of mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is one of empowering institutions Mukim through partnerships with related technical SKPK. As for the Suggestion of the researcher is to the County Government's budget Team (TAPK) districts of Aceh Singkil Regency to provide sufficient budget operations and strengthen the structure of the Mukim Mukim and implement bimtek to strengthen the knowledge the Government's apparatus and Mukim.

Key Word : Efektivitas, Mukim, System Of Government, Strategi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural. Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di *gampong-gampong* atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Adat di Aceh.

Secara yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan segala simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara *de jure*, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara *de facto*. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan *gampong* dan penyelenggaraan pemerintah *gampong* di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya diakui sebagai unit pemerintahan yang

berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata.

Terbentuknya sistem pemerintahan mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap ideal tersebut. Kedudukan pemerintahan mukim yang berada di bawah kecamatan dan di atas pemerintahan *gampong* menjadi struktur pemerintahan unik yang diakui oleh negara dan hanya berlaku di Aceh saja. Dinamika kelembagaan di masa lampau yang relatif mampu mengatur kehidupan sosio-kultural masyarakat secara adil dan bijaksana dipandang relevan untuk diaplikasikan pada kehidupan masa kini. Padahal, konteks kebijakan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh sekarang telah jauh berbeda. Harus diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Aceh saat ini pun penuh dinamika dan terkesan problematik. Akibatnya, Mukim belum mampu memberi peran yang signifikan sesuai tugas dan fungsi formalnya.

Mukim pada saat ini diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang memiliki tugas dan fungsi di bagian pemerintahan serta tugas dan fungsi di bagian adat. Fungsi-fungsi ini kemudian kerap mengundang persoalan baru karena kebijakan yang menuntut Mukim bergerak pada dua wilayah yang berbeda dan berpotensi terjadinya friksi. Pada saat ini, transformasi Mukim menjadi lembaga formal dalam sistem pemerintahan masih membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan dan pengakuan dari negara. Pasalnya hak ulayat mukim dan kewenangan yang telah diatur dalam UUP A dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim masih membutuhkan kajian sinkronisasi dan adaptasi dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada sebelumnya. Apalagi, tata kelola pemerintahan Mukim di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Aceh saat ini dipastikan

berbeda satu sama lain mengingat kondisi geografis, potensi sumber daya alam yang beragam dan kemampuan masing-masing Mukim yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Singkil yang terbentuk melalui undang-undang Nomor 14 tahun 1999 sangat mendukung keberadaan dan fungsi dari mukim sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan adat istiadat dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam, sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Aceh Singkil yang berlimpah, meminimalisir konflik antar kerukunan antar umat beragama, menegakkan syari'at islam, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseriusan ini terlihat dengan dikeluarkannya Qanun No 4 Tahun 2006 tentang pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk tesis dengan judul:“ Efektifitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan dengan 20 Mukim dan 116 Desa merupakan daerah yang sangat strategis terdiri dari wilayah perbukitan, lautan, kepulauan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata dengan bentangan alam yang luas dan subur dengan keadaan topografis sebahagian kecamatan dan desa yang sangat jauh dengan ibu kota Kabupaten, sehingga keberadaan Mukim sangatlah mendukung terutama terhadap pengelolaan aspirasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, adat

istiadat, penegakan syariat islam dan meminimalisir konflik antar umat beragama. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektifitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
2. Bagaimana Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.
2. Untuk mengkaji strategi penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Mendapatkan formulasi strategi yang tepat untuk penguatan keberadaan Mukim di Kabupaten aceh singkil
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan kebijakan dalam penguatan keberadaan Mukim di Kabupaten Aceh singkil.

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan untuk peningkatan Pemberdayaan keberadaan peran Mukim di Kabupaten Aceh Singkil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.2 Pengertian Efektifitas

Menurut Emerson dalam Handayani (2006:16), efektivitas adalah “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Pasolong (2007:9), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “Efek” dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kemudian menurut Sedarmayanti (2006:61), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Efektivitas menurut Gie dalam Budiani (2007:52) menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh

mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.3 Pengertian Peranan

Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah: “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Menurut Beck, William dan Rawlin(1986:293) pengertian peranan adalah “cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual”. Menurut Biddle dan Thomas, peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Menurut Beck, William dan Rawlin(1986:293) pengertian peranan adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peranan juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

2.3 Mukim

Mukim adalah Pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *Gampong* (Desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Secara Historis, Pemerintahan Mukim adalah suatu pemerintahan yang sudah ada pada masa kesultanan Aceh. Mengenai kaitannya dengan pemerintahan itu sendiri, menurut Ndraha (2005:24) pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Pemerintah adalah aktor dan aktris pemerintahan. U.Rosental (1986) dalam Syarif (2009:17) mengatakan bahwa pemerintahan sebagai ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya stuktur-stuktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu pemerintahan umum dirumuskan sebagai keseluruhan stuktur dan proses-proses yang melibatkan kebijaksanaan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Mukim bagi Hurgronje (1985) bukanlah hasil bentukan atau ciptaan Pemerintah Hindia Belanda atau Pemerintah Indonesia melainkan hasil bentukan Pemerintah Aceh. Irine (2008:7) berpendapat bahwa Mukim masih memiliki makna sebagai lembaga sosial yang di dalamnya terdiri dari struktur lembaga dengan individu-individu yang mempunyai posisi sosial dan mempunyai peran sosial, yaitu sebagai penjaga implementasi syariat Islam. Mukim dalam pandangan administrasi pemerintahan berkedudukan diantara kecamatan dan gampong dan dari aspek relasi kelembagaan, Mukim berfungsi menjembatani gampong dengan kecamatan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukom*), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam setiap melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang mendukung didalamnya. Ini juga berlaku pada Pemerintahan Mukim. Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari Sekretariat Mukim, Majelis Musyawarah Mukim, Majelis Adat Mukim dan Imeum Chik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sago Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain. Pada level Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Selanjutnya pada pasal 114 ayat (1), (2)

dan (3) dinyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Mukim dipimpin oleh Imuem mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim dibantu oleh tuha peut mukim atau nama lain. Imuem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun.

Sementara Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa Mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim, Mukim dipimpin oleh imuem mukim seperti dijelaskan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan mukim. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa Imuem mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah. Pemilihan Imuem Mukim dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan. Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Mukim menjelaskan bahwa Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/ perselisihan-perselisihan yang tidak dapat di selesaikan oleh Gampong. Pada pasal (2) dijelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman. Pada pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa mukim dipimpin oleh seorang imuem

mukim yang dipilih melalui musyawarah mukim. Organisasi mukim terdiri dari imeum mukim, sekretariat mukim, tuha peut mukim dan imuem chik. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan:

Tugas dan kewajiban Imuem Mukim adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- g. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- h. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
- i. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan

j. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

2.4 Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa hirarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan daerah (atau *qanun*)

Keberadaan Pemerintahan Mukim sekarang telah diatur secara cukup jelas dan tegas dalam Undang-Undang dan Qanun. Yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XV dengan judul Mukim dan Gampong. Dan sebagai penjabaran atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah pula diundangkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Bahkan di dalam Pasal 3 qanun tersebut dinyatakan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan apalagi dengan cara cukup eksplisit - dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), maka keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya

diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal.

2.5 Peranan Kepala Mukim dalam Pengambilan Keputusan

Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Dengan adanya peranan maka kepala mukim memiliki wewenang dalam hal pengambilan keputusan dari cara yang ditetapkan dan berjalannya Pemerintahan Mukim menggambarkan bahwa Mukim memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai penyelesaian sengketa di tingkat Gampong (Desa) dengan bantuan lembaga perwakilan Mukim.

Secara umum pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang dilakukan kepala mukim berdasarkan fungsi yang ada diantaranya :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dengan demikian persoalan yang terjadi di Gampong (Desa) dengan mengetahui fungsi yang dimiliki maka kepala mukim dapat menjalankan peranannya untuk bekerja dan mengambil tindakan terhadap segala kendala yang terjadi tanpa meragukan apa yang dapat dilakukan dengan adanya kejelasan maka Kepala Mukim sangat membantu camat dalam bertugas.

2.6 Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk mencapai keberhasilan organisasi (David, 2003). Proses manajemen strategi adalah suatu pendekatan obyektif, logis dan sistematis untuk menghasilkan berbagai macam keputusan yang bermanfaat demi suksesnya sebuah organisasi.

Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Keputusan strategi merupakan sasaran mencapai tujuan akhir.

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Kebijakan menunjukkan bagaimana sumber daya harus dialokasikan dan bagaimana tugas yang diberikan harus dilaksanakan dari tingkat atas sampai tingkat dasar. Strategi adalah rencana

yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tatanan lingkungan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai (Porter, 1993).

Menurut Muhammad (2003), komponen-komponen pokok dari manajemen strategi meliputi (1) analisis lingkungan untuk mendeteksi adanya peluang dan ancaman, (2) analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi adanya kekuatan dan kelemahan, (3) strategi bisnis untuk mencapai tujuan dan perhatian terhadap misi organisasi. Komponen strategi bisnis dikerjakan berdasarkan urutan fungsi pokok manajemen, yakni perencanaan, implementasi dan pengawasan.

Ruang lingkup manajemen strategi meliputi tiga kajian utama, yakni formulasi strategi, implementasi dan evaluasi strategi. *Formulasi strategi* meliputi kegiatan penetapan visi dan misi, kajian internal dan eksternal, rumusan sasaran jangka panjang serta penentuan strategi yang tepat, implementasi strategi antara lain berupa penetapan sasaran tahunan dan alokasi sumber daya, sedangkan evaluasi strategi adalah bagaimana organisasi melakukan pengukuran dan mengevaluasi kinerja (Jauh dan Glueck, 1996).

Selanjutnya David (2002) menyatakan proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. *Tahap perumusan strategi*, rumusan strategi yang diputuskan harus diperhitungkan agar dapat memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan, dengan kegiatan mulai dari pengembangan misi bisnis, memahami peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal serta menetapkan rencana obyektif jangka panjang.

- b. *Implementasi strategi*, adalah merumuskan untuk merubah strategi yang ditetapkan menjadi suatu tindakan manajemen. Kegiatan pada tahap ini meliputi kebijakan obyektif tahunan, pengalokasian sumber daya dan memobilisasi pelaku organisasi.
- c. *Evaluasi strategi*, merupakan tahapan akhir dari manajemen strategi dengan kegiatan utamanya adalah meninjau strategi faktor internal dan eksternal yang dijadikan dasar strategi saat ini, mengukur prestasi dan pengambilan tindakan korektif.

Menurut Umar (2001) berdasarkan tingkatan manajemen, perencanaan dapat di bagi dua yaitu: perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis ditujukan kepada bagaimana manajemen puncak dapat menentukan visi, misi dan strategi organisasi untuk jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional lebih menekankan pada bidang fungsional dari organisasi untuk tujuan jangka pendek.

2.7 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para pengguna analisis SWOT adalah semata-mata sebuah analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu

1. Strategi SO (Strength-Opportunity)
2. Strategi WO (Weakness- Opportunity)
3. Strategi ST (Strenght-Threat)
4. Strategi WT (Weakness-Threat)

1. Strategi SO (Strenght-Opportunity).

Strategi ini menggunakan kekuatan internal organisasi untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar perusahaan. Pada umumnya, organisasi berusaha melaksanakan strategi-strategi WO,ST atau WT untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu jika organisasi memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau organisasi harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat.Sedangkan, jika organisasi menghadapi banyak ancaman, organisasi harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada.

2. Strategi WO (Weakness-Opportunity)

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal organisasi dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadang kala organisasi menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan-kelemahan internal, misalnya ada permintaan yang tinggi terhadap perangkat elektronika untuk mengontrol jumlah dan waktu (*Fuel Injection*) pada mesin mobil (Opportunity) tetapi pabrik-pabrik mengalami kesenjangan teknologi untuk memproduksi alat-alat ini (weakness).

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kesenjangan teknologi ini adalah melalui strategi WO, Yakni dengan mengadakan suatu kerjasama dengan

organisasi lain yang ,memiliki kompetensi

3. Startegi ST (Strength-Threat)

Melalui Strategi ini organisasi berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal, hal ini bukan berarti organisasi yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman. Salah satu contoh strategi ST adalah ketika perusahaan Texas Instrumen mendapat dana hampir \$700 juta dari hasil denda sembilan perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar hak paten pada produk *semikonduktor memory chips* ciptaanya (*strenght*) akan tetapi, perusahaan-perusahaan pesaing yang melakukan tindakan pembajakan melakukan inovasi dan memproduksi produk sejenis yang merupakan ancaman besar bagi perusahaan Texas Instrument.

4. Strategi WT (Weakness-Threat)

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Suatu organisasi yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman ekstrenal sesungguhnya berada dalam posisi yang berbahaya.

5. Diagram SWOT

Dalam diagram SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan antara faktor internal Peluang (*Opportunities*) dan ancama (*threats*), dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).



Gambar 1. Diagram SWOT

Keterangan:

Kuadran I : Ini situasi yang sangat menguntungkan organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kuadran II : Meskipun menghadapi ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Kuadran III: Organisasi mengalami peluang besar, tetapi dilain pihak, ia

menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Focus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat memberikan peluang besar yang lebih baik

Kuadran IV: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Tujuan Penulisan	Hasil
1.	Muzakir, Husaini Ibrahim tahun 2017 Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh	Untuk mengetahui Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh	Adapun peran Mukim dalam menjaga kearifan lokal di Aceh: Pertama, Mukim merupakan sebuah lembaga yang lahir dari rahim kultur masyarakat Aceh yang agamis sehingga kehadirannya menjadi penengah dalam problematika yang dihadapi masyarakat. Kedua, Mukim memiliki sumber daya yang melimpah meliputi laut,

			<p>gunung, lembah, persawahaan padang rumput, aliran sungai, rawa dan lain lain. Sumber daya yang ada dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada dikawasan Mukim yang bersangkutan</p> <p>Ketiga, peran Mukim dalam rangka memelihara kearifan lokal khusus di Mukim Siem yaitu dengan merumuskan suatu kebijakan melalui musyawarah kerja Mukim untuk merencanakan apa-apa yang akan dilakukan.</p>
2.	Peranan Lembaga Mukim Dalam Pembangunan Di Kecamatan	Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah peranan lembaga mukim dalam pelaksanaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) lembaga mukim dalam melaksanakan pembangunan di

	<p>Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.</p>	<p>pembangunan di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang lembaga mukim di Aceh Barat, (2) Mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi lembaga mukim dalam pelaksanaan pembagunan di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh</p>	<p>Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang mukim di Aceh Barat, (2) dalam pelaksanaan pembangunan lembaga mukim tidak mengalami kendala dan hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan terhenti. Dalam upaya mengatasi kendala dalam pembangunan lembaga mukim melakukan koordinasi atau musyawarah dengan semua pihak. Kesimpulan (1) lembaga mukim melaksanakan pembangunan sesuai dengan Qanun Nomor 3</p>
--	--	---	--

			<p>Tahun 2010 tentang mukim di Aceh Barat,(2) Dalam pelaksanaan pembangunan lembaga mukim tidak mengalami kendala yang menyulitkan karena semua pihak turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan, dalam upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan lembaga Mukim melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. Di sarankan kepada pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman dan Desa/Gampong agar terus meningkatkan pembangunan agar</p>
--	--	--	--

			<p>kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Di harapkan kepada pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk melengkapkan struktur Mukim sesuai Qanun nomor 3 tahun 2010 tentang mukim di Aceh Barat, agar lembaga Mukim /bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan.</p>
3.	<p>Rina Melisa Tahun 2014 Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya</p>	<p>Untuk Mengetahui Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.</p>	<p>penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh imuem mukim Parom selaku pemimpin adat/ informal dan pemimpin pemerintahan/ formal belum terlaksana dengan</p>

	Provinsi Aceh.		baik. Disamping itu hubungan kerja Camat dengan Imeum mukim dan keucik dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim Parom adalah hubungan kerja koordinasi dan fasilitasi.
4.	Syahwaludin Tahun 2016 Peran Imum Mukim Terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran imum mukim dalam pencegahanpendangkalan aqidah dalam masyarakat dan respon masyarakat dalam pembinaan pencegahan pendangkalan	peran imum mukim dalam membina aqidah masyarakat selama ini bahwa tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat bukan merupakan tanggung jawab utamanya, dan menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat dan masyarakat pun menilai imum mukim dalam hal membina aqidah

			<p>masyarakat untuk saat ini dimana dan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti himbauan kepada masyarakat menghidupkan majelismajelis pengajian di masjid-masjid atau di gampong-gampong</p>
--	--	--	--

2.9 Kerangka Pemikiran

Penataan pemerintahan di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 2 Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa daerah Aceh di bagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim , Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong. Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2003 yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Mukim, baik yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintahan Mukim itu sendiri. Menurut Pasal 114 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pengaturan tentang Mukim diatur lebih lanjut dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota, berdasarkan lokus penelitian peneliti di Kabupaten Aceh Singkil maka Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Kabupaten Aceh

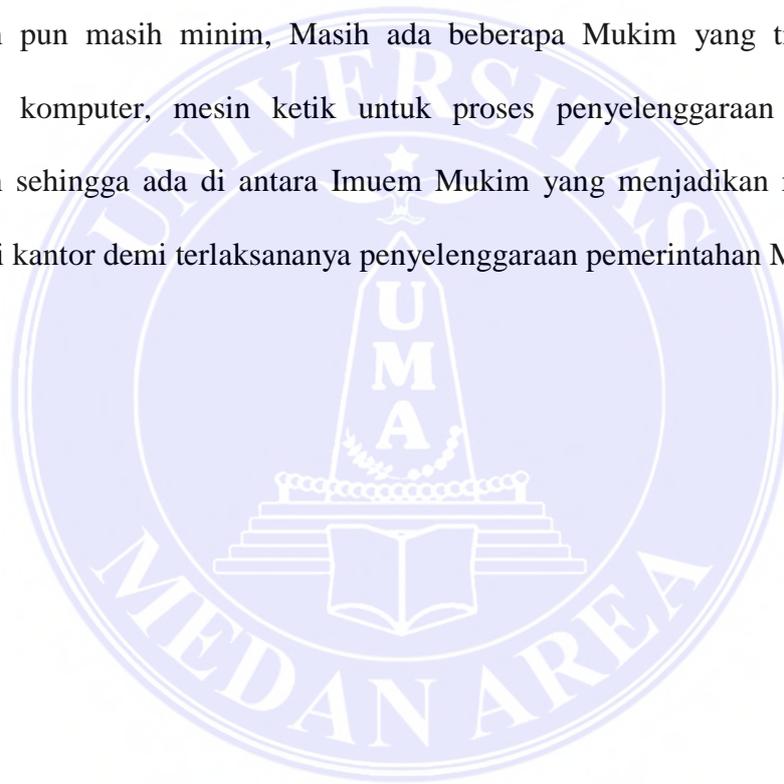
Singkil Nomor 4 Tahun 2006. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Aceh dan juga sub sistem Pemerintahan Nasional dan Mukim dapat melakukan perbuatan hukum. Mukim memiliki sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim, hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim, dari bantuan pemerintah tingkat atas, dari uang adat dan dari bantuan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Mukim memiliki wewenang untuk mendamaikan sengketa adat dan Mukim merupakan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Organisasi Pemerintahan Mukim adalah Pemerintahan Mukim, Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim. Pemerintahan Mukim terdiri dari Imuem mukim yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan Mukim, Imuem Chik merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan imuem mukim dalam pelaksanaan syariat Islam dan Sekretaris Mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala kepala seksi. Majelis Musyawarah Mukim merupakan badan legislatif di Mukim. Majelis Adat Mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.

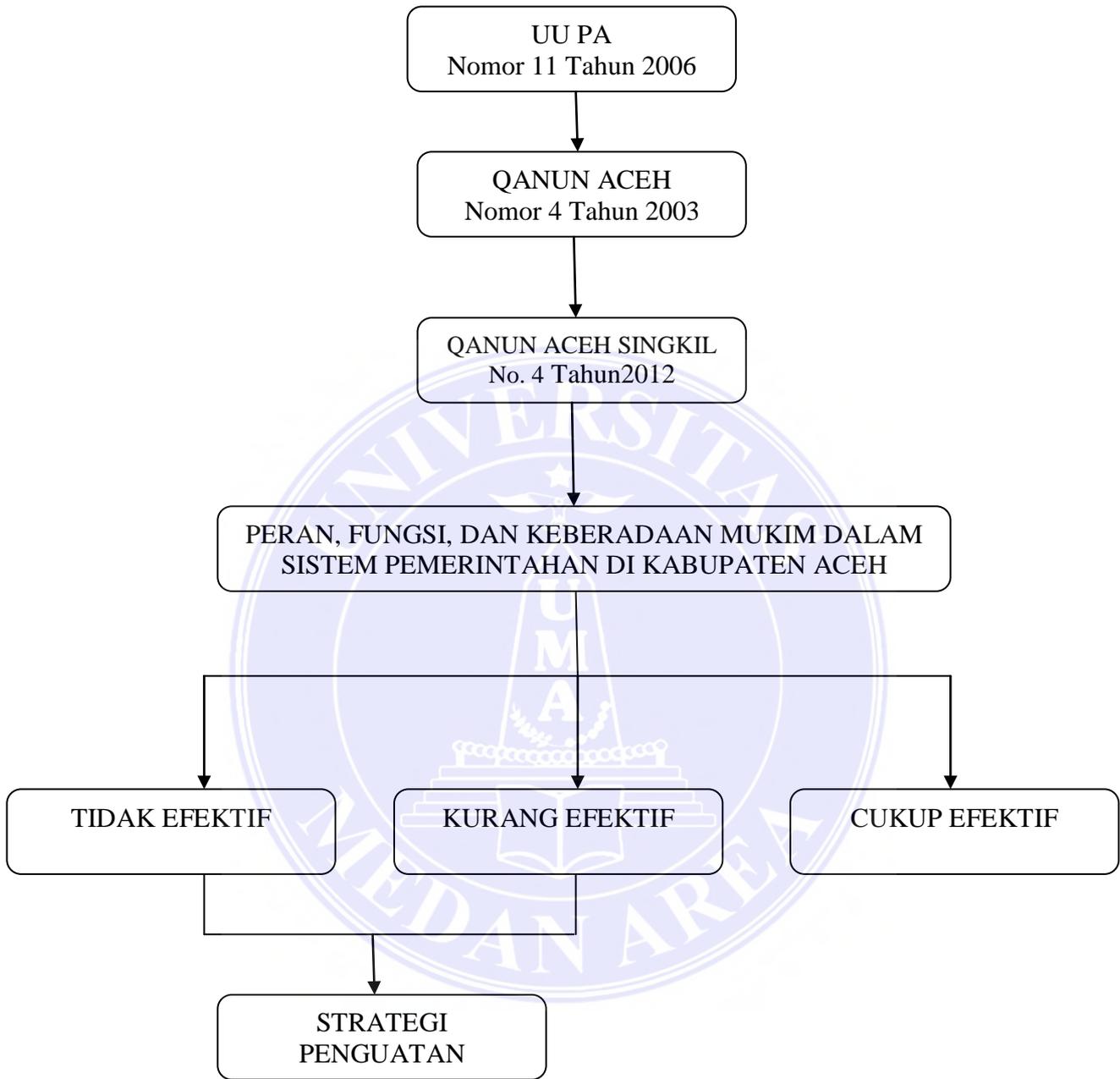
Walaupun keberadaan Mukim yang dipimpin oleh imuem mukim telah

diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan telah dipertegas dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2006, namun dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh masih banyak terdapat kekurangan, sebagai contoh tugas dan fungsi Imuem mukim yang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada semua pihak untuk memberitahukan dan mempertegas bahwa lembaga Mukim merupakan lembaga pemerintahan resmi di Provinsi Aceh bukan hanya sebagai lembaga adat saja yang tidak memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintah, mengakibatkan banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan lembaga Mukim, sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, makanya tidak banyak peran yang dapat dilakukan oleh Imuem Mukim sebagai pemimpin Pemerintahan Mukim, Imuem Mukim kurang berfungsi. Imuem Mukim selama ini masih kurang perannya sebagaimana diharapkan oleh Imuem Mukim sendiri, sebagaimana Imuem Mukim Tempo dulu pada saat kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim pada masa kerajaan dulu mendapatkan posisi yang sangat urgen dalam struktur pemerintahan. Karena memang saat itu fungsi Mukim sangat jelas, maka Mukim menjadi institusi yang sangat dihormati. Sayangnya oleh perubahan rezim, perubahan zaman, posisi Mukim sempat tidak mendapatkan kejelasan. Sehingga Mukim yang seyogyanya lebih dihormati dari Keuchik malah tidak mendapat perhatian masyarakat. Sehingga secara peranpun tidak terlalu banyak peran yang bisa dilakukan oleh Imuem Mukim.

Kedepan diharapkan fungsi, tugas, dan wewenang Imuem Mukim secara legalitas segera tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan lain

yang terjadi di Mukim adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh Keuchik, Mukim yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Gampong terkadang cenderung tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan Mukim melainkan langsung ke Kecamatan, sehingga tidak berjalannya lembaga Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Kecamatan. Sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya Pemerintahan Mukim pun masih minim, Masih ada beberapa Mukim yang tidak memiliki kantor, komputer, mesin ketik untuk proses penyelenggaraan pemerintahan Mukim sehingga ada di antara Imuem Mukim yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Mukim.





Gambar 2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian Peranan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Maret 2019

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Dalam pelaksanaan penelitian didasarkan pada pengumpulan data di tempat penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan responden, untuk mengetahui faktor-faktor strategis lingkungan eksternal dan internal serta informasi lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Observasi dilaksanakan baik melalui kuesioner maupun wawancara langsung dengan para pakar dan *stakeholder* yang memahami topic penelitian. Jenis data primer dan sumber di sajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Data Efektifitas Peranan Mukim	<ul style="list-style-type: none"> • Para Camat di Lingkup Aceh Singkil • Para Mukim di Lingkup Aceh Singkil • Tokoh Adat • Tokoh Ulama
2	Data Inventarisir Faktor strategis Eksternal dan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten 1 Setda Kab • Ka.Bag Pemerintahan setdakab Kab • Para Camat • Tokoh Adat • Tokoh Ulama

3.2.1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah referensi yang berhubungan dengan judul penelitian. Jenis dan sumber data sekunder yang digunakan disajikan pada Table 3.2.

Tabel 3.2. Jenis dan Sumber Data Skunder

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Gambaran Umum wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Tahun 2017)	BPS Kabupaten Aceh Singkil
2.	Daftar Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh Singkil Tahun 2017	BPS Kabupaten Aceh Singkil
3.	Jumlah Penduduk dan Fasilitas Desa	BPS Kabupaten Aceh Singkil

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* random sampling (sengaja), dimana responden untuk penelitian ini ditentukan secara sengaja. Responden terdiri dari eksekutif dan stakeholder dari tingkat kabupaten yang dianggap memahami permasalahan yang berhubungan dengan Efektifitas peran mukim terhadap sistem pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil

Responden untuk melihat efektifitas peranan mukim terhadap sistem pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 orang, terdiri dari personalia seperti yang tersaji pada Tabel 3.3. berikut;

Tabel 3.3. Daftar Responden Untuk Menganalisis Efektifitas Peranan Mukim

No	Jabatan/Pekerjaan	Jumlah Responden (orang)
1.	Para Camat di Kabupaten Aceh Singkil	11
2.	Para Mukim di Kabupaten Aceh Singkil	20
3.	Tokoh Ulama	1
4.	Tokoh Adat	1
	Jumlah	33

Dilain pihak responden untuk pembobotan faktor-faktor Strategis Eksternal dan Internal dan untuk analisa SWOT terdiri dari personalia seperti tersaji pada Tabel 3.4 berikut;

Tabel 3.4. Daftar Responden Untuk Inventarisir Faktor-Faktor Strategis Eksternal dan Internal

No	Jabatan/ Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Asisten 1 Setda Kab	1
2.	Para Camat	11
3.	Tokoh Ulama	1
4.	Tokoh Adat	1
Jumlah		14

3.4. Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan mengenai peranan mukim di sistem pemerintahan kabupaten Aceh Singkil. Dimana ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektifitas peranan dari mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Adapun analisisnya akan dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1 Analisis Efektifitas Peranan Mukim di Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Efektivitas keberadaan kelembagaan hasil tanggapan dari responden yaitu dapat dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian keefektivan yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Penentuan skor tersebut menggunakan skala *Likert*. Pengukurannya dilakukan dengan menghadapkan seorang responden pada beberapa pertanyaan, kemudian responden tersebut diminta untuk memberikan jawaban atau tanggapan yang terdiri dari tiga tingkatan dalam skala tersebut. Jawaban-jawaban tersebut diberikan skor 1-3 dengan pertimbangan skor terbesar

adalah tiga (3) untuk jawaban yang paling mendukung dan skor terendah adalah satu (1) untuk jawaban yang tidak mendukung. Berdasarkan perolehan skor dari responden, selanjutnya ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan efektivitas keberadaan kelembagaan. Selang diperoleh dari selisih skor tertinggi yang mungkin dengan total skor minimal yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban (Umar,2005).

$$\text{Selang} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kategori Jawaban}} - 1$$

Berdasarkan perolehan nilai selang, selanjutnya ditentukan skor efektivitas keberadaan kelembagaan dengan cara membagi tiga skor diantara total nilai minimal sampai total nilai maksimal hingga diperoleh tiga selang efektivitas. Selang terendah menyatakan bahwa efektivitas keberadaan kelembagaan rendah, sementara selang tertinggi menyatakan bahwa keberadaan kelembagaan efektif. Dari nilai selang tersebut dapat ditentukan rentang skala tiap kategori penilaian. Skala rentang penilaian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2

Penilaian tanggapan responden terhadap keberadaan kelembagaan Mukim akan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu efektif, cukup efektif dan tidak efektif. Nilai skor yang diperoleh adalah antara 231 – 692. Nilai skor 231 didapat dari hasil pengalian skor terendah (1) dengan jumlah parameter yang digunakan yaitu tujuh dan dengan jumlah responden yang telah ditentukan jumlah 33 responden, atau dapat ditulis ($1 \times 7 \times 33 = 231$). Sedangkan nilai skor 692 diperoleh dari hasil pengalian skor tertinggi (3) dengan jumlah parameter yang digunakan tujuh dan dengan jumlah responden 33 atau dapat ditulis ($3 \times 7 \times 33 = 692$). Penentuan selang

dilakukan dengan cara pengurangan antara nilai skor maksimum dengan nilai minimum yang kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya kategori penilaian, selanjutnya dikurangi satu. Nilai 154 merupakan hasil dari penghitungan tersebut atau ditulis dengan :

Tabel 3.5 Kategori Penilaian

Kategori Penilaian	Rentang Skala
Tidak efektif	231-384
Kurang Efektif	385-538
Cukup Efektif	539-692

Berdasarkan Tabel diatas, dijelaskan bahwa jika total skor berada pada rentang nilai antara 231-384, maka keberadaan kelembagaan dapat dikatakan tidak efektif. Jika total skor berada pada rentang nilai antara 385-538, maka keberadaan kelembagaan dapat dikatakan kurang efektif. Sementara jika total skor berada pada rentang nilai antara 539-692, maka keberadaan kelembagaan dapat dikatakan cukup efektif.

3.4.2. Inventarisasi Faktor-faktor Strategis

Inventarisasi terhadap faktor-faktor strategis penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Aceh Singkil, dilakukan melalui kajian terhadap data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai institusi terkait. Analisis ini dimaksudkan untuk menyederhakan dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) serta mengevaluasi faktor-

faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) dalam Penguatan Keberadaan dari Mukim.

Tabel 3.6. Format Penentuan Bobot Faktor-faktor Strategis penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Aceh Singkil

Faktor Strategis	Faktor Strategis							Jumlah	Bobot
	A	B	C	D	E	...	N		
A									
B									
C									
D									
N									
Total									

3.4.3. Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Analisa ini dimaksudkan mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal kunci untuk memperoleh empat alternative tipe strategi. (1) *Strategi SO* atau strategi kekuatan dan peluang, yakni menggunakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. (2) *Strategi WO* atau strategi kelemahan dan peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. (3) *Strategi ST* adalah strategi kekuatan dan ancaman, yaitu menggunakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. (4) *Strategi WT* adalah strategi kelemahan dan ancaman merupakan taktik defensive untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Adapun skema matrik SWOT untuk analisis

penelitian ini seperti terlihat pada Gambar.3.

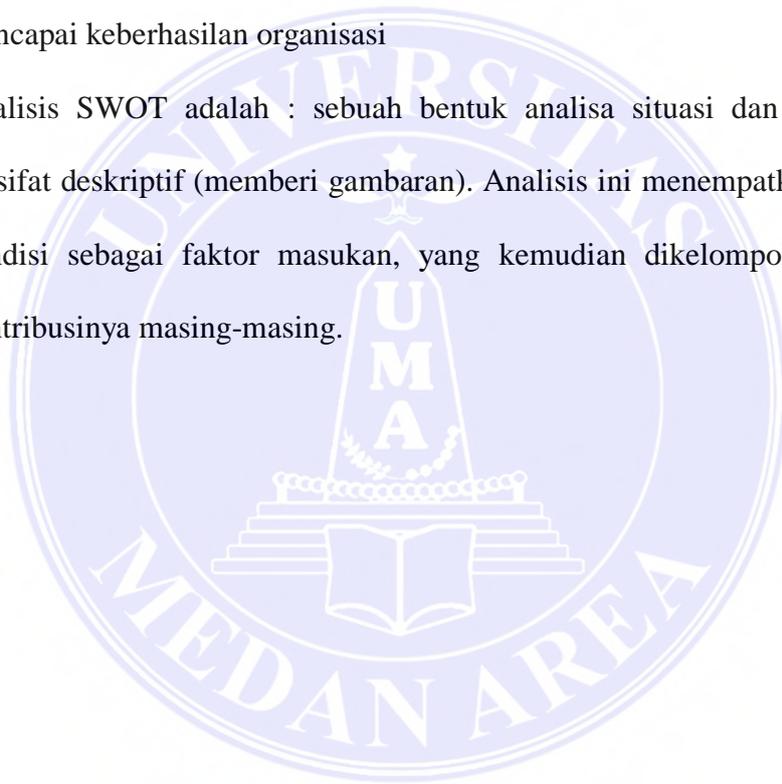
Faktor Internal	Strengths (S) Kekuatan	Weaknesses (W) Kelemahan
Faktor Eksternal	1. 2. 3. 4. N	1. 2. 3. 4. N
Opportunities (O) Peluang Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
1. 2. 3. 4. N	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Minimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang </div>
Threats (T) Ancaman Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
1. 2. 3. 4. N	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Minimalisasi kelemahan dengan menyikapi ancaman </div>

Gambar 3. Model Matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

3.5 Definisi Konsep

1. Efektifitas adalah : Pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Peranan adalah : serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

3. Mukim adalah : kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sago Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain.
4. Manajemen strategi adalah : sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk mencapai keberhasilan organisasi
5. Analisis SWOT adalah : sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas dari peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah kurang efektif.
2. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait
 - b. Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek
 - d. memperkuat struktur lembaga *mukim*
 - e. Pelaksanaan wewenag desa untuk pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab
 - f. Peningkatan peran mukim sebagai lembaga penengah/penyelesaian konflik adat ditengah masyarakat

5.2 Saran

Didalam memberikan wewenang yang luas, dan menjalankan peran dan fungsi mukim sesuai dengan Qanun Aceh Singkil No. 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemerintahan Mukim maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus

- a. Kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan/*memfloatingkan* anggaran yang cukup untuk operasional mukim dan memperkuat/melengkapi struktur dari Mukim dan melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintahan mukim untuk memperkuat lembaga mukim itu sendiri.
- b. Kepada para Camat Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat melibatkan fungsi dan wewenang mukim dalam penyusunan APB-Kam dan mengaktualisasikan hasil musrembang baik tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten
- c. Kepada Kepala Desa Lingkup Mukim Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat berkoordinasi dalam penyusunan APB-Kam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal. 2008. *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: Lipi Press
- Badan Pusat Statistik Aceh Singkil. 2017 , Singkil dalam Angka 2017 , Aceh Singkil, Aceh.
- Beck, William and Rawlin, . *The Theory of Social dan Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1947. Dikutip dalam Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna”Eka Taruna Bhakti”. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1.
- David, L. 2003. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta
- Freddy Rangkuti. (2006) “*Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*” Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gayatri, Irine H. 2007 *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*, LIPI Press
- Handayani, Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Husein Umar. (2005). *Strategic Management In Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irine H. Gayatri. 2008, Runtuhnya Gampong di Aceh; Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.

- M. Syarif. 2009, *Gampong dan Mukim di Aceh; Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Rumpun Bambu
- Muzakir, Husaini Ibrahim, 2017. Peranan mukim dalam memperkuat kearifan local di Aceh. *Jurnal mahasiswa FISIP Unsyiah*:Volume 2:289-328 Mei 2017
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology Sebuah Charta Pembaruan*. Tangerang Banten: Sirao Credentia Center
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Rina Melisa, 2016. Kepemimpinan imum mukim di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *jurnal Adm pemerintahan daerah*. Volume VIII.edisi 1
- Sedarmayanti, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Syahwaludin,2016. Peran imum mukim terhadap pembinaan pendangkalan aqidah di Laweung.Skripsi.Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Arraniry Banda Aceh.
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Umar. 2001. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Mukim
- <http://baleemukim.blogspot.com/2018/02/mukim-sebagai-pengembang-hukum-adat.html>

KUISSIONER PENELITIAN
EFEKTIFITAS PERAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL



Oleh : A Z M I
NPM. 171801004
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2019

Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Nama Responden :
3. Umur Responden : tahun
4. Pendidikan :
6. Pekerjaan :

I. Efektifitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

Petunjuk Pengisian:

1. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban.
2. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak mempengaruhi Pelayanan yang diterima.
3. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 3 dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/masalah terkait.

Skor jawaban adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------|------------------|------|
| Skor 1 | = Tidak Setuju | (TS) |
| Skor 2 | = Setuju | (S) |
| Skor 3 | = Sangat Setuju. | (SS) |

No	Keterangan	TS	S	SS
		1	2	3
1	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pendapatan masyarakat/aparatur pemerintahan			
2	Keberadaan mukim dapat meningkatkan kesempatan kerja.			
3	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pembangunan .			
4	Keberadaan mukim dapat meningkatkan budaya daerah.			
5	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pendidikan aparatur pemerintahan			
6	Keberadaan mukim dapat meningkatkan eksistensi lembaga mukim.			
7	Keberadaan mukim dapat meningkatkan eksistensi aparatur pemerintahan			

II. Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

1. PENENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

Tujuan : Penentuan peringkat (rating) dimaksudkan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi lingkungan. Variabel Faktor internal ini terdiri dari faktor **kekuatan** yang dimanfaatkan dan factor **kelemahan** yang mungkin dapat diatasi upaya strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Penentuan nilai rating berdasarkan pada keterangan berikut:

Identitas Kepentingan	Definisi Nilai
4*	Jika faktor tersebut berpengaruh sangat besar/kekuatan utama bagi daerah
3*	Jika Faktor tersebut berpengaruh besar/kekuatan besar bagi daerah
2**	Jika faktor tersebut kurang berpengaruh / kelemahan kecil bagi daerah
1*	Jika faktor tersebut sangat kurang berpengaruh/kelemahan besar bagi daerah

Nilai Faktor-faktor kekuatan

Nilai faktor-faktor Kelemahan

Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil terhadap faktor-faktor berikut ini.

Kekuatan faktor Internal Strategi

No	Faktor Internal Strategis	Peringkat (Rating)			
		4	3	2	1
1	Adanya Regulasi/peraturan yang jelas tentang keberadaan mukim				
2	Sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD				
3	Desentralisasi pemerintahan desa				
4	Belum memiliki struktur manajemen yang baku				
5	Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional,				
6	Tidak memiliki dana operasional				

2. PENENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Tujuan : Penentuan peringkat (rating) dimaksudkan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi lingkungan. Variabel faktor eksternal ini terdiri dari faktor **peluang** yang dapat dimanfaatkan dan faktor **ancaman** yang mungkin dapat diatasi upaya Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil terhadap faktor-faktor berikut ini.

Identitas Kepentingan	Definisi Nilai
4*	Jika faktor tersebut berpengaruh sangat baik bagi daerah
3*	Jika faktor tersebut berpengaruh baik bagi daerah
2*	Jika faktor tersebut kurang berpengaruh bagi daerah
1*	Jika faktor tersebut sangat kurang berpengaruh bagi daerah

Nilai Faktor-faktor kekuatan

Nilai faktor-faktor Kelemahan

Menurut Bapak / Ibu bagaimana kondisi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil terhadap faktor-faktor Eksternal berikutini

Kekuatan faktor eksternal strategi

No	Faktor eksternal Strategis	Peringkat (Rating)			
		4	3	2	1
1	kerja sama koordinasi antar instansi				
2	Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Dana Desa				
3	Pesatnya dinamika kehidupan dan pertumbuhan Penduduk				
4	Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab				

3. PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

Tujuan: Mendapatkan penilaian para responden terhadap factor-faktor internal mengenai kepentingan suatu factor strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah berupa pemberian bobot terhadap seberapa besar factor strategis Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

MatrikPembanding berpasangan untuk factor internal

No	Faktor Internal Strategis	NILAI KETERKAITAN						TOTAL	BOBOT
		1	2	3	4	5	6		
1	Adanya Regulasi/peraturan yang jelas tentang keberadaan mukim								
2	Sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD								
3	Desentralisasi pemerintahan desa								
4	Belum memiliki struktur manajemen yang baku								
5	Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup								

	pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional,								
6	Tidak memiliki dana operasional								

Keterangan:

1.= Jika indikator horizontal kurang penting dari pada indikator vertical

2.= Jika indikator horizontal sama pentingnya dengan indikator vertical

3.= jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertical

Bobot = Total / sigma total

4. PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)

Tujuan: Mendapatkan penilaian para responden terhadap factor-factor internal mengenai kepentingan suatu factor strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah berupa pemberian bobot terhadap seberapa besar factor strategis tersebut menentukan keberhasilan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Matrik Pembandingan berpasangan untuk factor eksternal

No	Faktor eksternal Strategis	NILAI KETERKAITAN				TOTAL	BOBOT
		1	2	3	4		
1	kerja sama koordinasi antar instansi						
2	Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Dana Desa						
3	Pesatnya dinamika kehidupan dan pertumbuhan Penduduk						
4	Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab						

Keterangan:

1.= Jika indikator horizontal kurang penting dari pada indikator vertical

2.= Jika indikator horizontal sama pentingnya dengan indikator vertical

3.= jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertical

Bobot = Total / sigma total.

